

# LAPORAN TENTANG

## SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N-LAPOR!) SEMESTER 1 TAHUN 2024



**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! Semester I Tahun 2024 ini dapat selesai pada waktunya.

Laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! Semester I Tahun 2024 adalah bertujuan mengetahui tingkat kinerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! Semester I Tahun 2024.

Akhir kata mohon maaf yang sebesar-besarnya bilamana dalam laporan ini terdapat kekurangan serta kesalahan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Dibuat di Samarinda  
Pada tanggal 29 Juli 2024  
Kepala Dinas Kehutanan,

}{ttd}

**H. Joko Istanto, S.P., M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197508072000031003

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	2
<b>Daftar Isi</b> .....	3
<b>Daftar Tabel</b> .....	4
<b>A. Pendahuluan</b> .....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Landasan Hukum .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	6
<b>B. Kegiatan Yang Dilaksanakan</b> .....	7
<b>C. Hasil Yang Dicapai</b> .....	9
<b>D. Kesimpulan Dan Saran</b> .....	28
<b>E. Penutup</b> .....	29

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan SP4N-LAPOR .....	9
Tabel 2. Rincian Pengaduan SP4N-LAPOR .....	11

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 490/10005/SJ tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!, yang berisi imbauan kepada Gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengelolaan pengaduan hanya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dengan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikelola oleh Kementerian PAN-RB bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Kepresidenan dan Ombudsman RI.

Melalui Surat Edaran tersebut maka dihimbau kepada seluruh Perangkat pada Pemerintah Daerah agar mencegah atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan SP4N-LAPOR!, namun apabila telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum ditetapkannya Perpres Nomor : 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan aplikasi tersebut ke dalam LAPOR tersebut.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan fungsi sebagai admin pengelola aduan dan aspirasi sehingga memiliki kewajiban untuk berkoordinasi secara proaktif dengan pengelola utama admin yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang memberitahu untuk segera ditindaklanjuti laporan pengaduan. Adapun indikator keberhasilan pengelolaan pengaduan dapat diukur sebagai berikut :

- Percepatan waktu penyelesaian pengaduan.
- Kualitas tanggapan pengaduan terutama responsibilitas secara faktual dilapangan.
- Tingkat kepuasan masyarakat.

## 2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024.

## 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik.
- b. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

#### **1.1 Penyiapan Bahan**

Penyusunan laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! menggunakan alat bantu berupa pengaduan secara offline maupun online yaitu melalui *website* <https://www.lapor.go.id/> yang disosialisasikan kepada masyarakat.

#### **1.2 Tim Pengelolaan SP4N-LAPOR**

Tim pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR! ini adalah Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD KPHP/KPHL/Tahura Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

#### **1.3 Penyusunan Jadwal**

Penyusunan jadwal laporan Aduan dan SP4N-LAPOR! dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Persiapan selama 5 hari kerja, tanggal 2 sampai dengan 6 Januari 2024.
- b. Pelaksanaan data pengaduan selama periode antara bulan Januari sampai dengan Juni 2024.
- c. Pengumpulan data pengaduan dilaksanakan selama 5 hari kerja, tanggal 17 Juni sampai dengan 21 Juni 2024.
- d. Penyusunan dan pelaporan Aduan dan SP4N-LAPOR! selama 5 hari kerja, tanggal 24 Juni sampai dengan 28 Juni 2024.

## **2. Pelaksanaan**

### **2.1 Pelaporan Pengaduan**

Pengaduan diisi sendiri secara online maupun offline oleh pelapor yang ingin mengadu terkait kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, pelapor diharapkan mengisi pengaduannya dengan melampirkan bukti pengaduan.

### **2.2 Pengumpulan Data Pelapor**

Pengumpulan data pelapor dilaksanakan dengan cara mengambil data pengaduan pada masing-masing Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta juga melalui sosial media, email dan website <https://www.lapor.go.id/>.



## C. HASIL YANG DICAPAI

### 1. Pengelolaan Pengaduan

#### 1.1 Verifikasi Aduan dan Aspirasi

Pada Tahun 2024 hasil verifikasi aduan offline maupun melalui online aplikasi SP4N-LAPOR! periode bulan Januari sampai dengan Juni, terdapat **59 laporan** yang terdiri dari pengaduan. Adapun rincian laporan pengaduan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan dan SP4N-LAPOR! Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur**

No	Instansi	Jumlah
1.	Dinas Kehutanan	0
2.	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto	2
3.	UPTD KPHL Batu Rook	0
4.	UPTD KPHL Balikpapan	4
5.	UPTD KPHP Batu Ayau	0
6.	UPTD KPHP Bengalon	4
7.	UPTD KPHP Berau Barat	3
8.	UPTD KPHP Berau Pantai	1
9.	UPTD KPHP Berau Tengah	3

10.	UPTD KPHP Berau Utara	1
11.	UPTD UPTD KPHP Bongan	5
12.	UPTD KPHP Damai	5
13.	UPTD KPHP Delta Mahakam	2
14.	UPTD KPHP Kelinjau	6
15.	UPTD KPHP Kendilo	6
16.	UPTD KPHP Manubar	4
17.	UPTD KPHP Meratus	4
18.	UPTD KPHP Mook Manor Bulatn	0
19.	UPTD KPHP Santan	8
20.	UPTD KPHP Sub Das Belayan	0
21.	UPTD KPHP Telake	1
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>

Tabel 2. Rincian Pengaduan dan SP4N-LAPOR Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

**ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD TAHURA BUKIT SOEHARTO SEMESTER 1 TAHUN 2024**

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	24 Mei 2024	PT. Kertanegara Energi Perkasa	Melalui Surat	Pemberitahuan Kegiatan Tambang Batubara di Area Tapak Tower T.034 dan T.037 Jaringan Transmisi PLTGU Senipah	Dinas Kehutanan UPTD Tahura Bukit Soeharto	PT. Kertanegara Energi Perkasa	Pengaduan
2	28 Mei 2024	PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga	Melalui Surat	Adanya Gangguan Warga di Jalan Masuk Lokasi Tahura 3 (TH-3)	Dinas Kehutanan UPTD Tahura Bukit Soeharto	PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga	Pengaduan

**ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHL BATU ROOK SEMESTER 1 TAHUN 2024**

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHL BALIKPAPAN SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	26 Maret 2024	Bapak Iman Mitra KPHL Balikpapan	WhatsApp (WA)	Perambahan Kawasan Hutan	KPHL Balikpapan	Kilometer 20, pada Hutan Lindung Sungai Manggar	
2	13 Mei 2024	KASI Trantib Kel. Karang Joang	WhatsApp (WA)	Pengecekan Penumpukan Material Tanah/Batuan	KPHL Balikpapan dan DLH Balikpapan	Kilometer 13, Perbatasan Kel. Karang Joang dengan Kec. Kariangau	
3	03 Juni 2024	Bapak Dodi	WhatsApp (WA)	Pengecekan Status Lahan untuk Pemasangan Tiang PLN	KPHL Balikpapan	Kilometer 10, pada Hutan Lindung Sungai Manggar, Jalan Tepo	
4	9 Juli 2024	Bapak Babam Mitra KPHL Balikpapan	WhatsApp (WA)	Perambahan Kawasan Hutan	KPHL Balikpapan	Kilometer 24, pada Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain	

### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP BATU AYAU SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP BENGALON SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	12 Februari 2024	PT. Silva Selaras Utama	Melalui Pengiriman Surat	Pengaduan atas dugaan terjadinya tindakan ilegal Logging dan Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Sawit pada Areal kawasan Hutan	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon	Di Areal Kawasan Hutan	Pengaduan
2.	20 Februari 2024	PT. Mahakam Persada Sakti	Melalui Pengiriman Surat	Laporan Perambahan Hutan Pada Areal Kawasan Lindung/Konservasi yang diduga Kuat dilakukan oleh Kelompok Tani Maju Makmur	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon	Di Areal Kawasan Hutan Lindung/Konservasi	Pengaduan
3.	16 April 2024	PT. Indexim Coalindo	Melalui Pengiriman Surat	Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di dalam wilayah PPKH PT. Indexim Coalindo	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon	di dalam wilayah PPKH PT. Indexim Coalindo	Pengaduan

4.	30 Mei 2024	PT. Silva Selaras Utama	Melalui Pengiriman Surat	Pengaduan atas dugaan terjadinya tindakan ilegal Logging dan Pembukaan Lahan untuk Perkebunan Sawit pada Areal kawasan Hutan Titik Koordinasi : 1°9'21,996"N 117°30'23,79"E 1°9'20,568"N 117°30'22,566"E	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Bengalon	Di Areal Kerja PT. Silva Selaras Utama	Pengaduan
----	-------------	-------------------------	--------------------------	--	------------------------------------	--	-----------

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP BERAU BARAT SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	30 Januari 2024	PT. Berau Coal	Surat	Ilegal Mining dan Ilegal Logging	KPHP Berau Barat	Kantor KPHP Berau Barat	Penyelesaian keluhan Bersama anggota PT. Berau Coal dan Pihak dari Kepolisian
2.	19 Februari 2024	PT. Karya Lestari	Surat	Adanya kegiatan penambangan Emas tanpa izin (PETI) dan Ilegal Logging di areal PT. Karya Lestari	KPHP Berau Barat	Kantor KPHP Berau Barat	Telah diproses

3.	06 Juni 2024	Masyarakat	Whatsap	Kebakaran Rumah Warga di daerah Sambaliung	KPHP Berau Barat	Kantor KPHP Berau Barat	Telah diselesaikan
----	--------------	------------	---------	--	------------------	-------------------------	--------------------

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP BERAU PANTAI SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	10 Juni 2024	Gusman	Telepon	Perambahan HPK	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Berau Pantai	Dumaring	Telah ditindak Lanjuti

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP BERAU TENGAH SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	28 Desember 2023	Masyarakat	Surat	Ilegal Logging	KPHP Berau Tengah	Kampung Pijanau	penyelesaian keluhan oleh Pihak yang Berwajib
2.	22 Januari 2024	Masyarakat	Surat	Ilegal Logging	KPHP Berau Tengah	Kampung Merapun Kec Kelay	penyelesaian keluhan oleh Pihak yang Berwajib

3.	11 Januari 2024	Masyarakat	Surat	Kebakaran Hutan	KPHP Berau Tengah	Tumbit Dayak	Penutupan status/penyelesaian keluhan
----	-----------------	------------	-------	-----------------	-------------------	--------------	---------------------------------------

### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP BERAU UTARA SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	06 Juli 2024	PT. Berau Jaya Energy	Melalui Pengiriman Surat	Permohonan bantuan personil untuk menyelesaikan permasalahan jalan hauling PT. Berau Jaya Energy	UPTD KPHP Berau Utara	Jalan Hauling PT. Berau Jaya Energy	Proses Tindak Lanjut

### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP BONGAN SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	22 Mei 2024	PT. Balikpapan Wahana Lestari	Surat	Pelaksanaan Patroli Rutin	UPTD KPHP Bongan	Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara	Penyelesaian Keluhan
2	05 Juni 2024	PT. Balikpapan Wahana Lestari	Surat	Pelaksanaan Patroli Rutin	UPTD KPHP Bongan	Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara	Penyelesaian Keluhan



2.	11 Juni 2024	Gapoktanhut Paser Sejahtera Bersama	Surat	Laporan Land Clearing dalam Kawasan Perhutanan Sosial Gapoktanhut Paser Sejahtera Bersama	UPTD KPHP Bongan	Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara	Penyelesaian Keluhan
4	14 Juni 2024	PT. Balikpapan Wahana Lestari	Surat	Perambahan Areal KBK (Deforestasi)	UPTD KPH P Bongan	Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara	Penyelesaian Keluhan
5	01 Juli 2024	PT. Balikpapan Wahana Lestari	Surat	Pelaksanaan Patroli Rutin	UPTD KPHP Bongan	Kel. Sotek, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara	Penyelesaian Keluhan

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP DAMAI SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	19-02-2024	PT. Firman Ketaun Perkasa	Surat	Pembukaan lahan jalan hauling PT. Manoor Bulatn Lestari	UPTD KPHP Damai	Kampung Besiq	Kawasan Hutan
2	27-02-2024	Elsa Wijaya	Whatshap	Illegal logging	UPTD KPHP Damai	Kampung Pendarung	APL (Tahura)
3.	25-03-2024	Ketua LPHD Baras Bulaw	Surat	Pembukan Lahan di Hutan Desa	UPTD KPHP Damai	Intu Lingau	Kawasan Hutan
4.	04-03-2024	PT. Manoor Bulatn Lestari	Surat	Illegal Logging	UPTD KPHP Damai	Houling Road PT. MBL Kampung Mantar	Kawasan HUtan

5.	28-05-2024	PT. Tepian Indah Sukses	Surat	Perambahan Hutan	UPTD KPHP Damai	Dilang Puti Bentain Besar	Kawasan Hutan
----	------------	-------------------------	-------	------------------	-----------------	---------------------------	---------------

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP DELTA MAHAKAM SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	17 Maret 2024	Muriono	Via WA	Karhutla	UPTD KPHP Delta Mahakam	Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara	Ditindak Lanjuti
2	12 Juni 2024	Ramlan	Secara lisan	Laporan Perambahan Kawasan Lahan	UPTD KPHP Delta Mahakam	Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara	Ditindak Lanjuti

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP KELINJAU SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	29 Januari 2024	MPA	WA Grup	Kejadian Kebakaran Lahan	UPTD KPHP Kelinjau	Desa Long Lees Kecamatan Busang	Ditindaklanjuti

2	16 Februari 2024	MPA	WA Grup	Kejadian Kebakaran Lahan	UPTD KPHP Kelinjau	Desa Long Pejeng Kecamatan Busang	Ditindaklanjuti
3	22 Februari 2024	Masyarakat Desa Benhes (Satpam PT Narkata Rimba)	Telepon Seluler	Kejadian Kebakaran Hutan	UPTD KPHP Kelinjau	Desa Benhes Kec. Muara Ancalong	Ditindaklanjuti
4	2 Maret 2024	MPA	WA Grup	Kejadian Kebakaran Lahan	UPTD KPHP Kelinjau	Desa Long Lees Kecamatan Busang	Ditindaklanjuti
5	18 Maret 2024	Kepala Desa Senyur	Surat	Pengaduan Penjualan Lahan di Dalam Kawasan	UPTD KPHP Kelinjau	Desa Senyur Kec. Muara Ancalong	Ditindaklanjuti
6	23 Juni 2024	KUPS Bina Kutai Bersatu	WA	Permohonan Penggantian Barang	UPTD KPHP Kelinjau	Desa Senyur Kec. Muara Ancalong	Ditindaklanjuti

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP KENDILO SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	20 Juni 2023	Kades Saing Prupuk	Lisan dan Tertulis	Masyarakat Desa petangis mengarap lahan di dalam kawasan hutan desa Saing Prupuk	KPH Kendilo	Kawasan Hutan Desa Saing Prupuk	Selesai

## ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP MANUBAR SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	20 Januari 2024	PT. Nadila Indodaya	Melalui Whatsaap	Laporan Penyebrotan Lahan PBPH PT. Nadila Indojoya Oleh Masyarakat	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Manubar	Di Kawasan PBPH PT. Nadila Indojoya	Pengaduan
2	09 Februari 2024	PT. Hanusetra	Melalui Whatsaap	Laporan Penyebrotan Lahan PBPH PT.Indo Subur Oleh Masyarakat	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Manubar	Di Kawasan PBPH PT. Hanusetra	Pengaduan
3.	26 Maret 2024	PT. Silva Selaras Utama	Melalui Surat	Laporan pengrusakan, perambahan, mengerjakan, dan menggunakan area hutan secara tidak sah milik perusahaan PT Silva Selaras Utama	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Manubar	Di Kawasan PBPH PT Silva Selaras Utama	Pengaduan
4.	12 Juni 2024	PT. Silva Selaras Utama	Melalui Surat	Laporan terjadi aktivitas pembukaan dan pemerataan lahan di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) dan Lindung Nasional menggunakan 2 alat berat berupa Excavator	Dinas Kehutanan UPTD KPHP Manubar	Di Kawasan PBPH PT Silva Selaras Utama	Pengaduan

### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP MERATUS SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	20 Februari 2024	BPPHLHK	Surat	Dugaan Penambangan Pasir Ilegal yang Merusak Kebun Masyarakat	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan KPHP Meratus	Desa Sidomulyo, Kecamatan Sepaku, Kab. PPU	Selesai/Sudah Ditindak Lanjuti
2.	18 Maret 2024	PT ITCI Kartika Utama	Surat	Proses Mediasi antara PT. ITCIKU, Pemerintah Kampung Muara Gusik, dan Kelompok Dayak Tunjung Induanjat	KPHP Meratus	Kec. Bongan Kab. Kubar	Selesai/Sudah Ditindak Lanjuti
3.	25 Maret 2024	PT Inhutani	Surat	Perambahan oleh Kelompok Tani di Kawasan Hutan Areal PT. Inhutani I PBPH UMHTI Batuampar – Mentawir yang Masuk di dalam Kawasan	KPHP Meratus	PT. Inhutani I PBPH UMHTI Batuampar – Mentawir	Selesai/Sudah Ditindak Lanjuti

				Lindung/Kawasan Penyanggah IKN			
4.	07 Mei 2024	PT Alamjaya Bara Pratama	Surat	Bantuan Tenaga Polisi Kehutanan untuk Pelaksanaan Verifikasi Lapangan	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan KPHP Meratus	Bakungan dan Jembayan	Selesai/Sudah Ditindak Lanjuti

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP MOOK MANOR BULATN SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP SANTAN SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	23-01-2024	Masyarakat Mitra Polhut Desa Sebulu Ulu	Via Watsapp Grup	Pertambangan Tanpa Ijin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, GAKKUM Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda dan Dirjen GAKKUM KLHK	Desa Sebulu Modern (SP.07) Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.	Pengumpulan bahan dan informasi serta menunggu tindak lanjut aduan Dishut Prov Kaltim ke dirjen Gakkum KLHK
2.	06-02-2024	Kelompok Tani Hutan Maju Bersama (PS/ Pak Mugi)	Via Watsapp dan Pendampingan Pelaporan dari Penyuluh Kehutanan (Pak Budi Hartanto Setyawan A.Md.)	Rencana Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, PSKL.	Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.	Proses Pengumpulan Bahan Keterangan dan sudah dilakukan pemasangan plang larangan melakukan aktifitas Perkebunan tanpa izin Menteri
3.	20-03-2024	Pak Jumain (Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim/ Polhut/ Warga)	Via Watsapp dan komunikasi antara anggota organisasi Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia	Pertambangan Tanpa Ijin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, GAKKUM Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda	Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Keb. Kutai Kartanegara.	Proses Pengumpulan Bahan Keterangan

			(IPKI)				
4.	26-03-2024	MMP Lestari Mandiri Kec. Bontang Selatan	Via Watsapp Grup MMP Lestari Mandiri dan Ibu Evi Kelompok Tani Sekambing Desa Bontang Lestari	Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah (pembuatan Villa) dalam Hutan Lindung Bontang, Merambah Kawasan hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, GAKKUM Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda, Polres Kota Bontang	Rt. 01 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang	Proses Pengumpulan Bahan Keterangan dan Pemasangan Plang Larangan.
5.	03-04-2024	Pak Masdar (Tokoh Masyarakat desa Panca Jaya/ Pengelola Air Terjun Desa Cipari Makmur)	Via Watsapp dan Pendampingan Pelaporan dari Penyuluh Kehutanan (Pak Budi Hartanto Setyawan A.Md.)	Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah (jual beli lahan) di areal Hutan Produksi, Merambah Kawasan hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, GAKKUM Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda	Desa Cipari Makmur Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara (Berbatasan dengan Desa Panca Jaya)	Proses Pengumpulan Bahan Informasi
6.	24-04-2024	Kelompok Tani Hutan Maju Bersama (PS/ Pak Mugi)	Via Watsapp dan Pendampingan Pelaporan dari Penyuluh Kehutanan (Pak Budi Hartanto	Rencana Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, PSKL, GAKKUM Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda	Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.	Proses Pengumpulan Bahan Keterangan



			Setyawan A.Md.)				
7.	02-5-2024	Kelompok Tani Hutan Maju Bersama (PS/ Pak Mugi)	Via Watsapp dan Pendampingan Pelaporan dari Penyuluh Kehutanan (Pak Budi Hartanto Setyawan A.Md.)	Rencana Perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, PSKL, GAKKUM Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda	Desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.	Proses Pengumpulan Bahan Keterangan dan sudah dilakukan pemasangan plang larangan melakukan aktifitas Perkebunan tanpa izin Menteri, dan pemasangan patok / pal batas luar Kawasan hutan antara HP dan APL dalam Areal Perhutanan Sosial Kelompok tani hutan Maju Bersama

8.	12-6-2024	Masyarakat Mitra Polhut Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang	Via Watsapp	Pertambangan Tanpa Ijin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan	Dinas Kehutanan, UPTD KPHP Santan, GAKKUM Wilayah Kalimantan Seksi II Samarinda Dan Dirjen GAKKUM KLHK.	Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Areal PBPH PT. BHINEKA WANA dalam Hutan Produksi arealnya berbatasan dengan desa Mulawarman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutau Kartanegara.	Proses Pengumpulan Bahan Keterangan dan penam,bahan pemasangan plang larangan melakukan aktifitas Pertambangan tanpa izin Menteri.
----	-----------	--	-------------	--	---	---	--

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP DAS BELAYAN SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### ARSIP PENGELOLAAN ADUAN UPTD KPHP TELAKE SEMESTER 1 TAHUN 2024

No	Tanggal Diterima	Pelapor	Metodologi Pengaduan	Subjek Laporan	Instansi Berwenang	Lokasi Aduan	Status
1	12 Juni 2024	PT. Greaty Sukses Abadi	Melalui Pengiriman Surat	Permohonan Bantuan Sosialisasi dan Pengamanan Kawasan Jutan PT. GSA Unit	UPTD KPHP Telake	Batas PBPH HS PT. GSA Unit Telake dari Km 29	Proses Tindak Lanjut

				S.Telake/ pengaplingan tanah Kawasan Hutan oleh oknum perorangan		S/d 33	
--	--	--	--	---	--	--------	--

## 2. Permasalahan

Dengan ditunjuknya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai admin SP4N-LAPOR! serta Sub Admin pada UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maka tidak serta merta laporan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti segera.

Aduan yang masuk harus dipastikan ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Aduan dan SP4N-LAPOR! adalah sebagai berikut :

- Belum maksimalnya masyarakat tingkat tapak dalam menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR! dalam melapor pengaduan
- Masyarakat masih banyak melaporkan pengaduannya melalui offline
- Masih banyak pengaduan yang kurang jelas dan lengkap
- Waktu penyelesaian berbeda-beda karena menyesuaikan dengan tingkat aduan apakah berkadar pengawasan atau tidak

## 3. Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya penyelesaian masalahnya sebagai berikut :

- Menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!
- Melakukan sosialisasi aplikasi SP4N-LAPOR! kepada masyarakat tingkat tapak serta cara melaporkan pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!
- Melakukan koordinasi dengan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebelum dan sesudah melakukan verifikasi laporan untuk memastikan ketepatan aduan
- Verifikasi aduan tidak terlambat dan dengan tepat waktu sesuai SOP
- Melakukan monitoring dan evaluasi
- Memastikan laporan telah lengkap agar dapat segera diselesaikan

#### **4. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam pengelolaan layanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! penguatan kapasitas sumber daya manusia memainkan peranan yang penting, bukan hanya kuantitas namun juga kualitas sangat diharapkan. Dalam pengelolaannya memang belum tersedia jabatan fungsional pengelola pengaduan oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan-pelatihan bagi pengelola admin SP4N-LAPOR! setiap tahun untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas.

### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan dan Saran**

Pelaksanaan pengelolaan Aduan dan SP4N-LAPOR! Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2024 telah diselesaikan laporannya dengan baik. Diharapkan ke depan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat menjawab dan menyelesaikan dalam ketepatan dan kecepatan waktu yang lebih baik lagi.

Disamping melakukan pemantauan laporan atau aduan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan monitoring Aduan dan SP4N-LAPOR! pada UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang juga merupakan tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat melakukan koordinasi secara intensif untuk melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut.

## E. PENUTUP

Penyelenggaraan Pengelolaan Aduan Masyarakat telah dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan tahun berikutnya. Berdasarkan evaluasi pengelolaan aduan masyarakat, diperoleh rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan pengelola admin UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang belum menindaklanjuti aduan dengan tepat waktu.
2. Memberikan masukan kepada para pimpinan dan para pengambil kebijakan agar lebih menyadari pentingnya aspirasi dan aduan masyarakat untuk menentukan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Dibuat di Samarinda  
Pada tanggal 29 Juli 2024  
Kepala Dinas Kehutanan,



**H. JOKO Istanto, S.P., M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197508072000031003